

# RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024



**DISUSUN TAHUN 2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO**  
Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran  
S I D O A R J O - 61252  
Telp (031) 8963184, 8946551 Fax (031) 8946551



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN**

Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran Sidoarjo  
Telepon. (031) 8963184

Email : [dlhk.sidoarjokab@gmail.com](mailto:dlhk.sidoarjokab@gmail.com) Website : [dlhk.sidoarjokab.go.id](http://dlhk.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188/289/438.5.11/2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

### 13. Peraturan Menteri .....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

21. Peraturan Daerah .....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama, tertuang dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama, adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
  - b. Menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
  - d. Menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. M. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM  
NIP. 197012111991011001

**Dr. MOH. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 197012111991011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188/289/438.5.11/2023  
TANGGAL : 01 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2024**

- 1) Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
2) Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
3) Koordinator : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran  
2. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
3. Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau  
4. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan  
4) Anggota : 1. Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan Hidup  
2. Sub Koordinator Pembinaan dan Kemitraan  
3. Sub Koordinator Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum  
4. Sub Koordinator Pengelolaan B3 dan Limbah B3  
5. Sub Koordinator Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak  
6. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan  
7. Sub Koordinator Pertamanan dan Kebersihan  
8. Sub Koordinator Keindahan dan Dekorasi  
9. Sub Koordinator Pendataan, Pengendalian dan Pelayanan  
10. Sub Koordinator Angkutan Sampah  
11. Sub Koordinator Pelayanan Pengolahan Sampah  
12. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah  
13. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan  
14. Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
16. Sub Koordinator Keuangan  
17. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan  
18. Pengelola Bahan Perencanaan  
19. Pengelola Data pada Bidang

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. M. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM  
NIP. 197012111991011001

**Dr. M. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19701211 199101 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya , Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 merupakan Tahun Keempat Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Bab V Penutup.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian Tahun Berjalan (Tahun 2023). Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.

Sidoarjo, 10 Maret 2023  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO



Dr. M. BAHRI AMIG, S.Sos., MM  
Pemimpin Muda  
NIP. 19701211 199101 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

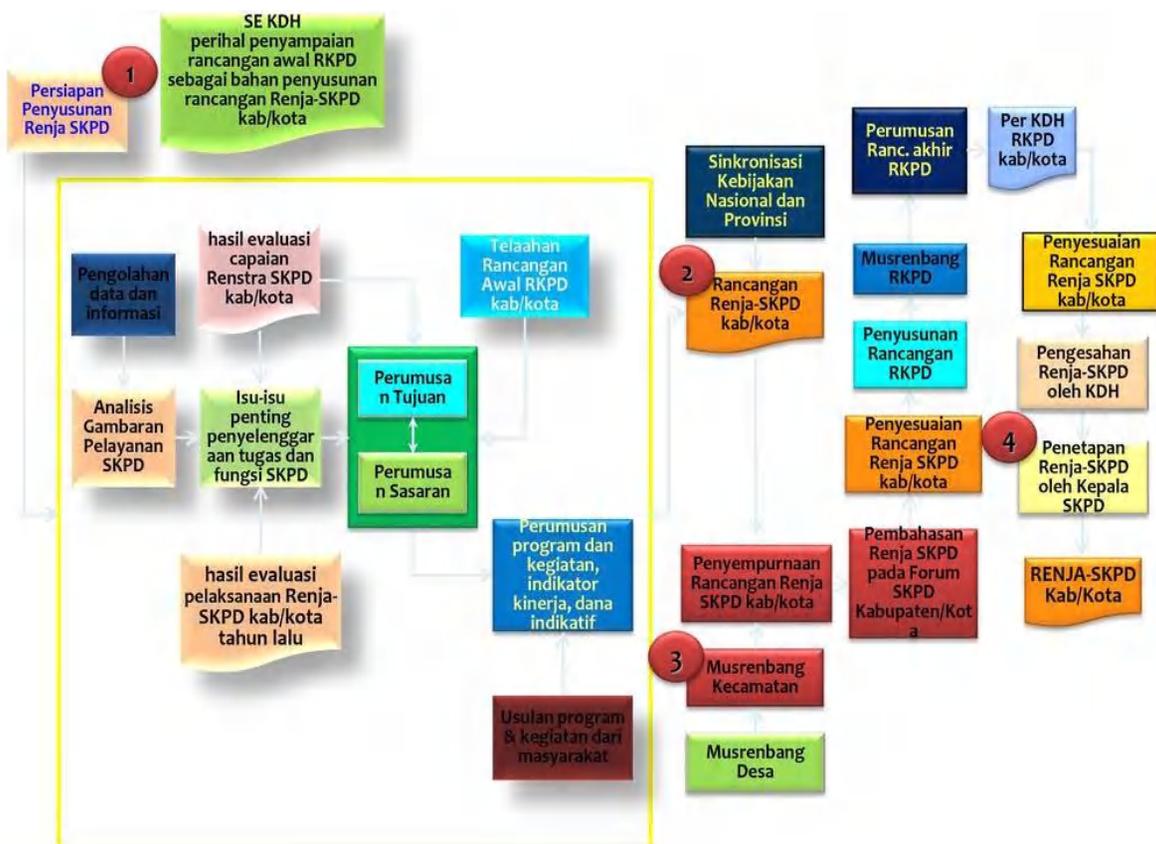
1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan



2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (*outcome*) , indikator kinerja kegiatan (*output*), indikator kinerja sub kegiatan (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota



Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);



24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022, Tahun Berjalan Tahun 2023 dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, meliputi:

- BAB I     PENDAHULUAN
- BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V     PENUTUP



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian / Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian / Lembaga.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2022) sampai dengan tahun berjalan pada Tahun 2023. Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 8 Program dan 13 Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp 107.793.281.232,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 98.325.596.686,00 atau 91 % dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 :

**Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>35.196.799.724</b>	<b>34.001.717.261</b>	<b>97</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.537.600	105.639.168	89



Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.330.273.992	29.555.746.973	97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	995.032.131	901.040.974	91
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.891.861	347.271.968	85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.337.663.200	2.115.856.338	91
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.400.940	976.161.840	97
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>4.185.133.091</b>	<b>3.616.775.628</b>	<b>86</b>
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4.185.133.091	3.616.775.628	86
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>28.596.753.605</b>	<b>26.972.417.761</b>	<b>94</b>
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	28.596.753.605	26.972.417.761	94
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		<b>162.944.366</b>	<b>80.623.260</b>	<b>49</b>
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	162.944.366	80.623.260	49



Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		<b>229.175.200</b>	<b>218.551.136</b>	<b>95</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	229.175.200	218.551.136	95
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>404.791.000</b>	<b>398.997.954</b>	<b>99</b>
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	404.791.000	398.997.954	99
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>307.864.295</b>	<b>294.130.468</b>	<b>96</b>
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	307.864.295	294.130.468	96



Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		<b>38.709.819.951</b>	<b>32.742.383.218</b>	<b>85</b>
	Pengelolaan Sampah	38.709.819.951	32.742.383.218	85

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari persentase pencapaian realisasi anggaran pada 8 (Delapan) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan pada umumnya sudah tercapai secara optimal, terdapat 1 (Satu) kegiatan yang capaian realisasinya kurang dari 80 % tetapi tidak menjadi hambatan dalam capaian kinerjanya, capaian realisasi keuangan yang kurang dari 80 % dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pada PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**, untuk Penyimpanan Sementara Limbah B3 anggaran sebesar Rp 162.944.366 realisasi sebesar Rp 80.623.260 (49 %) dikarenakan penyediaan anggaran pada tahun 2022 yakni (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas; (2) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan; (3) Belanja Jasa Tenaga Supir; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga; dan (5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin hanya bersifat penyediaan sebagai komitmen Pemerintah daerah setelah mendapatkan DAK Fisik Covid-19 Tahun 2021. Anggaran untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dan Belanja Jasa Tenaga Supir tidak terserap karena menurunnya angka Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo sehingga tempat isolasi Covid-19 terpusat di Kabupaten Sidoarjo tidak beroperasi kembali, selain itu operasional kegiatan sudah tercukupi oleh tenaga yang ada tidak memerlukan rekrutmen kembali untuk Tenaga Kebersihan dan Tenaga Supir. Sedangkan, anggaran untuk Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin tidak terserap karena dengan menurunnya angka Covid-19 menyebabkan timbulan limbah medis Covid-19 yang harus diangkut dengan kendaraan roda tiga dan disimpan di cold storage hanya sedikit sehingga tidak dilakukan penyerapan kegiatan pemeliharaan kendaraan dan cold storage.



Selain pengukuran tingkat realisasi anggaran juga dilakukan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Adapun realisasi kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 selengkapnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022*)	Capaian Tahun 2022 (%)
1	Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	6,42 mg/L	15,096 mg/L	43
		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO <sub>2</sub>	7,84 µg/m <sup>3</sup>	7,26 µg/m <sup>3</sup>	108
		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO <sub>2</sub>	13,68 µg/m <sup>3</sup>	15,13 µg/m <sup>3</sup>	90
2	Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase sampah yang terkelola	71 %	73 %	103
		Persentase luasan RTH yang terkelola	5,14 %	1,37 %	26,7
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	A	100
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	31,12	34,24	110
		Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	B	A-	100
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Sangat Baik	100
		Persentase penyerapan anggaran	85	91	107

\*) Sumber data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut uraian analisis keberhasilan dan kegagalan per sasaran antara lain :

### **SASARAN 1 : Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara**

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

#### **Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD**

1. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama dari aktivitas domestik masyarakat) dan rata-rata kualitas air badan air menunjukkan nilai yang rendah sejak dari hulu;
2. Keterbatasan sumber daya yang menyebabkan intervensi DLHK terhadap limbah rumah tangga belum optimal

#### **Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>**

1. Terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor;
2. Aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak memperhatikan kualitas lingkungan;
3. Alih fungsi lahan yang tidak diiringi dengan proporsi RTH yang memadai.

Upaya yang telah dilakukan :

#### **Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD**

1. Melakukan pemantauan air badan air secara periodik;
2. Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memperketat pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran air, termasuk pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil;
4. Menindaklanjuti pengaduan lingkungan terkait pencemaran air;
5. Melakukan pengelolaan sampah secara terpadu utamanya tumpukan sampah di sungai;



6. Mengoptimalkan fungsi TPST atau TPS 3R di setiap wilayah untuk mengurangi pembuangan sampah ke badan air;
7. Melakukan kerjasama pengendalian pencemaran air (penyediaan dan operasional ONLIMO (alat pemantau kualitas air) di intake IPA Kedunguling);
8. Menambah jumlah SDM Pengendalian Pencemaran Air

**Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>**

1. Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala pada saat Car Free Day;
2. Melakukan kegiatan pengawasan dan memperketat pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara baik udara emisi maupun udara ambien;
3. Melakukan penghijauan pada median dan pinggir jalan;
4. Monitoring kualitas udara ambien secara berkala pada Kawasan Industri, Kawasan Perumahan/ Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Transportasi;
5. Menggalakkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas lahan utamanya penyediaan tanaman penyerap polutan termasuk kebisingan dan dituangkan dalam Dokumen Lingkungan;
6. Pengadaan Alat *Ozone Generator (Air Cooling Generator)* dalam rangka peningkatan kualitas udara.

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

**Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD**

1. Pemantauan air badan air di 13 saluran/ sungai secara periodik (termasuk parameter BOD);
2. Melakukan kegiatan Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai dan pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah;
3. Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memperketat pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran air

**Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>**

1. Melakukan kegiatan pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat secara berkala;
2. Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala (termasuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>).



### Simpulan atas pencapaian kinerja :

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran ini **belum berhasil**. Hal ini dikarenakan Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD dan Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO<sub>2</sub> belum memenuhi target kinerja.

## **SASARAN 2 : Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo**

### Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

#### **Persentase sampah yang terkelola**

1. Permintaan pelayanan angkutan sampah semakin meningkat namun sarana dan prasarana angkutan sampah belum memadai ;
2. Belum optimal kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) atas pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah kepada masyarakat/sumber sampah;
3. Belum optimal peran serta pelaku usaha dalam melakukan pembatasan timbulan sampah

#### **Persentase luasan RTH yang terkelola**

- Belum tersedianya lahan yang diajukan perluasan RTH

### Upaya yang telah dilakukan :

#### **Persentase sampah yang terkelola**

1. Membentuk kelembagaan baru pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tujuan agar pengelolaan sampah di TPA lebih fokus dan profesional;
2. Memberikan sosialisasi terkait penanganan sampah di TPST yang terdiri dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah;
3. Membuat regulasi baru terkait pedoman perhitungan besaran biaya pengelolaan sampah di masyarakat;
4. Merevitalisasi sarana prasarana angkutan sampah;
5. Memberikan sarana prasarana pengolahan sampah di TPST yang telah ditentukan

#### **Persentase luasan RTH yang terkelola**

1. Mengidentifikasi penambahan luas RTH melalui fasum perumahan;
2. Melaksanakan revitalisasi beberapa RTH Taman yang merupakan asset DLHK



Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

**Persentase sampah yang terkelola**

1. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana yang ada dan mengatur ulang ritasi agar sampah di Kabupaten Sidoarjo dapat tertangani;
2. Memprioritaskan upaya pengurangan sampah melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), serta melakukan koordinasi dan bersinergi dengan OPD lainnya dalam melakukan sosialisasi;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam mengembangkan dan memasarkan produk hasil inovasi pemanfaatan kembali sampah.

**Persentase luasan RTH yang terkelola**

- Melaksanakan identifikasi lahan pada fasum perumahan yang dapat digunakan untuk perluasan RTH

Simpulan atas pencapaian kinerja :

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran ini **belum berhasil**. Hal ini dikarenakan Persentase luasan RTH yang terkelola belum mencapai target.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Tahun Berjalan (Tahun 2023) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3. Perhitungan Perkiraan Pencapaian Tahun Berjalan (Tahun 2023) diperoleh dari Pencapaian ketika Tahun Berjalan (Tahun 2022) dibagi dengan Target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.



**Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)\* Kabupaten Sidoarjo**

**Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	89 %	86 %	85 %	88 %	104	86 %	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	-	-
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	-	-
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	8 Dokumen	-	-	-	-	8 Dokumen	4 Dokumen	50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	91 %	93 %	81 %	91 %	112	81 %	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	-	100 %	-	-	-	-	-	-
	Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Persentase aset yang telah diamankan	75 %	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91 Nilai	87 Nilai	87 Nilai	94,27 Nilai	108	90 Nilai	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	2 Jenis	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100 %	7 Jenis	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Persentase sarana prasarana yang berfungsi baik	70 %	-	-	-	-	70 %	-	-
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan yang disusun</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten yang disusun	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD</b>	<b>51 %</b>	<b>45 %</b>	<b>43 %</b>	<b>20 %</b>	<b>47</b>	<b>43 %</b>	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	<b>Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub></b>	48 %	88 %	45 %	38 %	84	45 %	-	-
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	83 %	83 %	80 %	92 %	115	80 %	-	-
	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	85 %	80 %	81 %	88 %	109	82 %	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/ditetapkan	135 Rincian Teknis	93 Rincian Teknis	160 Rincian Teknis	192 Rincian Teknis	120	120 Rincian Teknis	-	-
	Persentase arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan	75 %	-	-	-	-	75 %	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 (pengumpulan limbah B3 skala kabupaten) yang diterbitkan	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah laporan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk (pengumpulan limbah B3 skala kabupaten)	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan</b>	4,8 %	3,62 %	3,3 %	6,4 %	194	3,6 %	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	93 %	99,09 %	93,6 %	89 %	95	90 %	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 %	0,03 %	0,5 %	0,6 %	120	0,5 %	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup</b>	<b>1 %</b>	<b>5,94 %</b>	<b>1 %</b>	<b>1,7 %</b>	<b>170</b>	<b>1 %</b>	-	-
	<b>Persentase sekolah peduli lingkungan hidup</b>	<b>0,8 %</b>	<b>1,27 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>100</b>	<b>0,8 %</b>	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga masyarakat yang diberikan diklat	5,2 %	2,3 %	5,5 %	6,32 %	115	4,9 %	-	-
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	-	-
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup</b>	0,7 %	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata	6 Sekolah	-	-	-	-	2 Sekolah	-	-
	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diberi penghargaan SKPL/Green Industry	5 Usaha dan atau Kegiatan	-	-	-	-	5 Usaha dan atau Kegiatan	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase penanganan sampah di TPA	59 %	41,2 %	47 %	48,2 %	103	50 %	-	-
	Persentase pengurangan sampah di TPST	30 %	23,69 %	28 %	24,6 %	88	29 %	-	-
Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	1025 Ton / hari	837,33 Ton / hari	990 Ton / hari	905 Ton / hari	91	950 Ton / Hari	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase luasan RTH yang terkelola	2,61 %	2,2 %	2,28 %	2,35 %	103	2,36 %	-	-
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (s.d Februari 2022)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	61 %	56 %	61 %	56 %	92	61 %	-	-
	Lokasi ruas jalan Kabupaten yang bersih	232 Ruas Jalan	-	-	-	-	232 Ruas Jalan	-	-
	Jumlah taman aktif yang dipelihara ornamennya	7 Taman Aktif	-	-	-	-	7 Taman Aktif	-	-
	Persentase permohonan perantingan dan penebangan yang tertangani	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-
	Persentase layanan data yang disediakan	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-
	Jumlah lokasi RTH yang dimonitor	12 Titik Lokasi	-	-	-	-	12 Titik Lokasi	-	-



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terlihat dalam tabel 2.4 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	IKK	Target				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD (mg/L) dalam setahun	-	6,43	6,42	6,41	6,4	5,16	15,096	-	6,41	6,4	Nilai Konsentrasi BOD semakin kecil semakin bagus
2	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO <sub>2</sub>	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO <sub>2</sub> (µg/ m <sup>3</sup> ) dalam setahun	-	7,85	7,84	7,83	7,82	7,75	7,26	-	7,83	7,82	Nilai Kualitas SO <sub>2</sub> semakin kecil semakin bagus
3	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO <sub>2</sub>	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO <sub>2</sub> (µg/ m <sup>3</sup> ) dalam setahun	-	13,69	13,68	13,67	13,66	14,57	15,13	-	13,67	13,66	Nilai Kualitas NO <sub>2</sub> semakin kecil semakin bagus



No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	IKK	Target				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
4	Persentase sampah yang dikelola	(Berat sampah yang dikelola / Berat timbulan sampah dalam setahun ) x 100 %	-	67 %	71 %	74 %	79 %	68 %	73 %	-	74 %	79 %	Berat sampah yang dikelola = Berat penanganan sampah TPA dan TPS / TPST
5	Persentase luasan RTH yang dikelola	Persentase luasan RTH yang dikelola = Luas Tutupan Vegetasi (km <sup>2</sup> ) ----- x 100 % Luas Wilayah Sidoarjo (km <sup>2</sup> )	-	5,13 %	5,14 %	5,15 %	5,16 %	1,46 %	1,37	-	5,15 %	5,16 %	



## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

### 1. Pemenuhan baku mutu air

Pemenuhan baku mutu air secara langsung menunjukkan kondisi tercemar atau tidaknya air badan air. Indikator tercemarnya sumber air atau badan air ditunjukkan dengan adanya perubahan kualitas air. Perubahan kualitas air ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kadar dari parameter tertentu dibandingkan standar yang ditetapkan, seperti meningkatnya nilai *biochemical oxygen demand* (BOD, kebutuhan oksigen untuk proses biokimiawi), dan menurunnya nilai *dissolved oxygen* (DO, oksigen terlarut).

Kualitas air badan air secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan industri, perdagangan, jasa dan perumahan. Hal ini secara signifikan berpotensi menyebabkan tingginya tingkat pencemaran air. Untuk meningkatkan kualitas air diperlukan penurunan tingkat pencemaran air dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan jenis aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Secara umum aktivitas yang dimaksud adalah pertanian, aktivitas domestik dan industri. Air limbah yang dihasilkan dapat menyebabkan pencemaran atau polusi pada badan air. Karena air limbah yang dihasilkan sering mengandung kadar pencemar kimia dan biologi. Air limbah sebagian bersifat *biodegradable* (terurai secara biologis) dan sebagian terserap dalam lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran dan masalah kesehatan.

Kondisi existing badan air atau sungai di Kabupaten Sidoarjo berupa saluran pembawa (primer dan sekunder) dan saluran pembuang (Afvoer). Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 saluran pembawa primer dan 46 saluran pembawa sekunder serta 47 saluran pembuang (Afvoer). Menurut penggunaannya, saluran-saluran tersebut berfungsi untuk mengairi sawah (irigasi pada kegiatan pertanian), selain itu juga berfungsi sebagai air baku air minum. Sedangkan menurut penyebabnya, pencemaran air badan air di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh air sisa irigasi pertanian yang mengandung pupuk dan pestisida. Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas air badan air, antara lain:

- Air limbah domestik, seperti kegiatan Rumah Tangga, Restoran, Hotel, Rumah Sakit
- Air limbah industri, seperti industri pengolahan makanan, industri kertas, industri sabun dan kegiatan industri lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran air.

Sebagai isu strategis, Kualitas air penting untuk dilakukan upaya pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air



agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

## 2. Pemenuhan Baku Mutu Udara Ambien

Kualitas udara saat ini sudah menjadi isu global seiring dengan kondisi kualitas udara yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan peningkatan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara bervariasi, khususnya di Kabupaten Sidoarjo adalah konsentrasi zat polutan (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO<sub>x</sub>, Debu, CH<sub>4</sub>) yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, konstruksi, transportasi dan Lumpur Lapindo. Berbagai polutan tersebut selain debu menyebabkan efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca dapat menyebabkan bumi bertambah panas yang biasa disebut *global warming*. Peningkatan suhu global dapat menyebabkan permukaan air laut naik dan perubahan pola cuaca dan iklim (*climate change*).

Sumber utama pencemaran udara ambien adalah emisi sumber bergerak dan emisi sumber tidak bergerak. Emisi sumber bergerak berasal dari kendaraan bermotor sedangkan emisi sumber tidak bergerak berasal dari emisi cerobong usaha / kegiatan, kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Kondisi existing kualitas udara menunjukkan bahwa polutan utama dari pencemaran udara antara lain:

- Pelepasan bahan kimia dan partikel ke atmosfer. Gas pencemaran udara yang biasa termasuk CO, SO<sub>2</sub>, CFC dan NO<sub>2</sub> yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan bermotor serta bahan gas pendingin ruangan (AC). Pertumbuhan industri dan penggunaan kendaraan bermotor saat ini semakin pesat dan meningkat. Pesatnya pertumbuhan ini menimbulkan perubahan infrastruktur jalan dan kebisingan yang meliputi kebisingan di jalan raya, kebisingan pesawat udara, kebisingan industri, serta sonar intensitas tinggi.
- *Indoor Air Pollution*, yaitu pencemaran udara akibat kegiatan internal di rumah tangga. Lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia terus bergantung pada bahan bakar padat, termasuk bahan bakar biomassa (kayu, kotoran, residu pertanian) dan batu bara, untuk kebutuhan energinya.

Kualitas udara ambien di Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2016-2021 masih memenuhi standar baku mutu udara yang ditetapkan yaitu menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur. Meskipun kualitas udara ambien menunjukkan hasil di bawah baku mutu namun tetap perlu dipertahankan mengingat kualitas udara menjadi isu global.



### 3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri RTH Aktif dan RTH Pasif. RTH Aktif terdiri dari Taman Publik dan Fasum sedangkan RTH Pasif terdiri dari Taman Publik , Median Jalan, Bahu Jalan, Pedestrian, Hutan Kota dan Kebun Bibit. Ketersediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Luas RTH yang terkelola DLHK Sidoarjo sampai dengan Tahun 2022 sebesar 28,83 Ha.

### 4. Pengelolaan Sampah

Kendala terkait pengelolaan sampah yaitu:

- a. Permintaan pelayanan angkutan sampah semakin meningkat namun sarana dan prasarana angkutan sampah belum memadai ;
- b. Belum optimal kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) atas pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah kepada masyarakat/sumber sampah;
- c. Belum optimal peran serta pelaku usaha dalam melakukan pembatasan timbulan sampa

Upaya yang telah dilakukan untuk pengelolaan sampah yaitu:

- a. Membentuk kelembagaan baru pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tujuan agar pengelolaan sampah di TPA lebih fokus dan profesional;
- b. Memberikan sosialisasi terkait penanganan sampah di TPST yang terdiri dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah;
- c. Membuat regulasi baru terkait pedoman perhitungan besaran biaya pengelolaan sampah di masyarakat;
- d. Merevitalisasi sarana prasarana angkutan sampah;
- e. Memberikan sarana prasarana pengolahan sampah di TPST yang telah ditentukan



## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024, maka penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Renja 2024, untuk nomenklatur program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tabel 2.5 berikut ini telah dijabarkan Penetapan pagu anggaran dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 yang merupakan Hasil Analisis Kebutuhan Awal bagi OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Hasil Rancangan Awal Renja tersebut dapat berubah ketika dilakukan analisis kembali kebutuhan lebih lanjut dan akan dimasukkan ke dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja).



Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87 %	71.179.453.441	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87 %	71.179.453.441	
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	1 Laporan	79.192.600	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	1 Laporan	79.192.600	
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Laporan				Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Laporan		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen		



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>8 Dokumen</b>				<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>8 Dokumen</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.300.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.300.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.300.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	52.592.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	52.592.600	
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Persentase realisasi anggaran PD</b>	<b>91 %</b>	<b>30.329.793 .269</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Persentase realisasi anggaran PD</b>	<b>91 %</b>	<b>30.329.793.269</b>	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang / Bulan	30.329.793.269	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang / Bulan	30.329.793.269	
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 Nilai	1.026.530.134	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 Nilai	1.026.530.134	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.048.389	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.048.389	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	36.707.539	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	36.707.539	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	299.949.991	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	299.949.991	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.220.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.220.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.680.000	
6	Penyediaan Bahan / Material	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	13.174.215	Penyediaan Bahan / Material	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	13.174.215	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.250.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	637.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	637.500.000	
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	2 Jenis	171.667.564	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	2 Jenis	171.667.564	
			Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu	90 %				Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu	90 %		
1	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	13 Unit	74.589.850	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	13 Unit	74.589.850	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	97.077.714	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	97.077.714	
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	2.640.595.280	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	2.640.595.280	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	916.092.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	916.092.080	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.724.503.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.724.503.200	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Jenis	527.335.050	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Jenis	527.335.050	
			Persentase sarana prasarana yang berfungsi baik	70 %				Persentase sarana prasarana yang berfungsi baik	70 %		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	302.335.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	302.335.050	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	115.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	115.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	110.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	110.000.000	
G	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Pendapatan BLUD	13.000.500.000	36.404.339.544	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Pendapatan BLUD	13.000.500.000	36.404.339.544	
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	36.404.339.544	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	36.404.339.544	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	47 %	3.597.570.642	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	47 %	3.597.570.642	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub>	46 %				Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub>	46 %		
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	81 %	3.597.570.642	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	81 %	3.597.570.642	
			Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	83 %				Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	83 %		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	258 Dokumen	1.619.621.548	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	258 Dokumen	1.619.621.548	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	220 Dokumen	1.977.949.094	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	220 Dokumen	1.977.949.094	
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</b>	100 %	225.859.200	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan</b>	100 %	225.859.200	
A	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/ disetujui	125 Rincian Teknis	225.859.200	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/ disetujui	125 Rincian Teknis	225.859.200	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan	75 %				Persentase arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan	75 %		
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	135 Dokumen	225.859.200	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	135 Dokumen	225.859.200	
IV	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan</b>	<b>4 %</b>	<b>210.860.200</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan</b>	<b>4 %</b>	<b>210.860.200</b>	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	91 %	210.860.200	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup	91 %	210.860.200	
			Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,8 %				Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,8 %		



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	75 Laporan	210.860.200	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	75 Laporan	210.860.200	
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup</b>	<b>1 %</b>	<b>166.331.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup</b>	<b>1 %</b>	<b>166.331.000</b>	
			<b>Persentase sekolah peduli lingkungan hidup</b>	<b>0,8 %</b>				<b>Persentase sekolah peduli lingkungan hidup</b>	<b>0,8 %</b>		



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	5 %	166.331.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	5 %	166.331.000	
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	80 Lembaga	166.331.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	80 Lembaga	166.331.000	
VI	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	165.348.200	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	165.348.200	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	165.348.200	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	165.348.200	
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	35 Dokumen	165.348.200	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	35 Dokumen	165.348.200	
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanganan sampah di TPA	53 %	10.240.199.413	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanganan sampah di TPA	53 %	10.240.199.413	
			Persentase pengurangan sampah di TPST	29 %				Persentase pengurangan sampah di TPST	29 %		
A	Pengelolaan Sampah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah berat sampah yang dikelola	975 ton / hari	10.240.199.413	Pengelolaan Sampah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah berat sampah yang dikelola	975 ton / hari	10.240.199.413	



No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 Laporan	1.610.007.600	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 Laporan	1.610.007.600	
2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	560 ton / hari	465.390.813	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	560 ton / hari	465.390.813	
3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	141 Kelompok	147.475.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	141 Kelompok	147.475.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	96.826.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	96.826.000	
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	78 Unit	7.920.500.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	78 Unit	7.920.500.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase luasan RTH yang dikelola	2,44 %	24.758.570.567	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase luasan RTH yang dikelola	2,44 %	24.758.570.567	
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	1 Dokumen	24.758.570.567	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati	1 Dokumen	24.758.570.567	
			Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	56 %				Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola	56 %		
			Lokasi ruas jalan Kabupaten yang bersih	232 Ruas Jalan				Lokasi ruas jalan Kabupaten yang bersih	232 Ruas Jalan		
			Jumlah taman aktif yang dipelihara ornamennya	7 Taman Aktif				Jumlah taman aktif yang dipelihara ornamennya	7 Taman Aktif		
			Persentase permohonan perantingan dan penebangan yang tertangani	100 %				Persentase permohonan perantingan dan penebangan yang tertangani	100 %		



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase layanan data yang disediakan	100 %				Persentase layanan data yang disediakan	100 %		
			Jumlah lokasi RTH yang dimonitor	12 Titik Lokasi				Jumlah lokasi RTH yang dimonitor	12 Titik Lokasi		
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	29 Ha	20.851.890.600	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	29 Ha	20.851.890.600	
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	120 Orang	237.700.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	120 Orang	237.700.000	
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	217 Unit	3.668.979.967	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	217 Unit	3.668.979.967	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>110.544.192.663</b>					<b>110.544.192.663</b>	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penanganan sampah di TPA</li> <li>- Persentase pengurangan sampah di TPST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 53 %</li> <li>- 29 %</li> </ul>	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah		Jumlah berat sampah yang dikelola	975 ton / hari	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	78 Unit	
	- Pemeliharaan Conveyor			1 Tahun	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87 %	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Target Pendapatan BLUD	Rp 13.000.500.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	



No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	- Pemeliharaan Alat Berat			1 Tahun	
	- Tanah Urug Sanitari			13200 m <sup>2</sup>	
	- BBM Operasional			1 Tahun	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase luasan RTH yang terkelola	2,44 %	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen pentahapan pembangunan taman tematik kehati</li> <li>- Persentase RTH Taman Aktif yang dikelola</li> <li>- Lokasi ruas jalan Kabupaten yang bersih</li> <li>- Jumlah taman aktif yang dipelihara ornamennya</li> <li>- Persentase permohonan perantingan dan penebangan yang tertangani</li> <li>- Persentase layanan data yang disediakan</li> <li>- Jumlah lokasi RTH yang dimonitor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Dokumen</li> <li>- 56 %</li> <li>- 232 Ruas Jalan</li> <li>- 7 Taman Aktif</li> <li>- 100 %</li> <li>- 100 %</li> <li>- 12 Titik Lokasi</li> </ul>	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota	29 Ha	
	- Pembangunan Taman			15 Paket	
	- Revitalisasi Taman			1 Paket	



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dalam tabel 3.1

Telaahan terhadap kebijakan nasional

Tabel 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Indonesia Asri dan Lestari	Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN) 2005-2025	Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (f) Pencegahan Kehilangan



No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
			<p>Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (g) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu</p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.</p> <p>4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA &amp; LH.</p>



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026, Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara
2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terlihat pada Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo

Indikator Kinerja Utama OPD	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	Nilai konsentrasi air badan air di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter BOD pada tahun berjalan	Rata-rata konsentrasi Air Badan Air di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter BOD pada tahun berjalan
Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO <sub>2</sub>	Nilai kualitas udara ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter SO <sub>2</sub> pada tahun berjalan	Rata-rata Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter SO <sub>2</sub> pada tahun berjalan
Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO <sub>2</sub>	Nilai kualitas udara ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter NO <sub>2</sub> pada tahun berjalan	Rata-rata Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sidoarjo untuk parameter NO <sub>2</sub> pada tahun berjalan



Indikator Kinerja Utama OPD	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
Persentase sampah yang terkelola	Berat sampah yang terkelola DLHK Sidoarjo yaitu Berat sampah yang terkelola di TPST dan TPA pada tahun berjalan	Persentase sampah yang terkelola = $\frac{\text{Berat Sampah yang terkelola DLHK Sidoarjo per tahun}}{\text{Berat Timbulan Sampah Kabupaten Sidoarjo per tahun}} \times 100 \%$
Persentase luasan RTH yang terkelola	Luas Tutupan Lahan (km <sup>2</sup> ) merupakan luasan yang berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Lahan	Persentase luasan RTH yang terkelola = $\frac{\text{Luas Tutupan Lahan (km}^2\text{)}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo (km}^2\text{)}} \times 100 \%$
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Nilai SAKIP pada tahun berjalan
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo	Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun berjalan
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Website SKM online	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan

- Jumlah program dalam Renja Tahun 2024 : 8 Program
- Jumlah Kegiatan dalam Renja Tahun 2024 : 14 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Tahun 2024 : 21 Sub Kegiatan
- Rincian Program pada Renja Tahun 2024 antara lain :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)

➤ Rincian Kegiatan pada Renja Tahun 2024 antara lain :

1. Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD
8. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
9. Penyimpanan Sementara Limbah B3
10. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
11. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Sampah
14. Pengelolaan Keanerakagaman Hayati Kabupaten / Kota



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Hasil Musrenbang terlihat pada BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahun 2024 . Rumusan Rencana Kerja tersebut dapat berubah seiring dengan adanya verifikasi Renja yang akan dilakukan.



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					110.544.192.663				146.009.001.894			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					71.179.453.441				104.030.500.000			
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					79.192.600				195.000.000			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		13.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			95.000.000
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		13.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			10.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		52.592.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH				90.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>30.329.793.269</b>	<b>44.940.500.000</b>			
2 11 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		234 orang / bulan		30.329.793.269	PENDAPATAN ASLI DAERAH				44.940.500.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1.026.530.134</b>	<b>1.895.000.000</b>			
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket		7.048.389	PENDAPATAN ASLI DAERAH				75.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 Paket		36.707.539	PENDAPATAN ASLI DAERAH				200.000.000
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		299.949.991	PENDAPATAN ASLI DAERAH				425.000.000
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket		19.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		7.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			20.000.000	
2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Paket		13.174.215	PENDAPATAN ASLI DAERAH			150.000.000	
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamü		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamü		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		5.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			25.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		637.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				900.000.000
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>171.667.564</b>					<b>550.000.000</b>
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Unit		74.589.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH				275.000.000
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Unit		97.077.714	PENDAPATAN ASLI DAERAH				275.000.000
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>2.640.595.280</b>					<b>4.500.000.000</b>
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		916.092.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.250.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		1.724.503.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH				3.250.000.000
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>527.335.050</b>					<b>950.000.000</b>
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Unit		302.335.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH				150.000.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Unit		115.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100.000.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				700.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Peningkatan Pelayanan BLUD												51.000.000.000			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		36.404.339.544					51.000.000.000			
2	11	03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						3.597.570.642					5.417.931.203			
2	11	03	2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						3.597.570.642				5.417.931.203			
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		258 Dokumen		1.619.621.548	PENDAPATAN ASLI DAERAH			2.417.931.203



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		220 Dokumen		1.977.949.094	PENDAPATAN ASLI DAERAH			3.000.000.000
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>							24.758.570.567			16.425.000.000		
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>							24.758.570.567			16.425.000.000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Ha		20.851.890.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH			13.050.000.000
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragam an Hayati		Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragam an Hayati		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 Orang		237.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			350.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		217 Unit		3.668.979.967	PENDAPATAN ASLI DAERAH				3.700.000.000
2 11 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>								225.859.200					273.070.691
2 11 05 2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>								225.859.200					273.070.691
2 11 05 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135 Dokumen		225.859.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH				273.070.691



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								965.000.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					210.860.200			965.000.000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Laporan	210.860.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH			965.000.000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					166.331.000			1.200.000.000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					166.331.000			1.200.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Lembaga		166.331.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1.200.000.000
2	11	10			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						165.348.200				510.000.000		
2	11	10	2.01		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>						165.348.200				510.000.000		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Dokumen		165.348.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH			510.000.000
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>						10.240.199.413				171.187.500.000		
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>						10.240.199.413				171.187.500.000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		1.610.007.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH				2.200.000.000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		560 ton / hari		465.390.813	PENDAPATAN ASLI DAERAH				129.887.500.000
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		141 Kelompok		147.475.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				50.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		96.826.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				50.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78 Unit		7.920.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				39.000.000.000
<b>TOTAL</b>									<b>110.544.192.663</b>				<b>146.009.001.894</b>	



## BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2024 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Tahun berjalan (Tahun 2023).

Dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"** serta sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu **(1) Meningkatkan pemenuhan baku mutu air dan udara ; (2) Meningkatkan kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo dan (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan.**

Sidoarjo, 10 Maret 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO



**Dr. M. BAHRIUL AMIG, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701211 199101 1 001

